

# **PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP BUDGET FORECAST ERRORS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

**TIARA RAHMA KUSUMA<sup>1</sup>**  
**SUTARYO**  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS*

## **Abstract**

*This study aims to examine the effect of Position Period, Political Support, Revenue Growth and Expenditure Growth on Local Government Budget Forecast Errors in Indonesia. This study used dependent variable like Budget Forecast Errors and so the independent variable used is Position Period, Political Support, Revenue Growth and Expenditure Growth.*

*This study uses secondary data from APBD preparation in 2007-2012 in form of softcopy from Internal Affair Ministry of Republic of Indonesia, data of local government financial statement from Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK RI), and website of local government. Collecting data using purposive sampling with the aim to obtain representative samples. There are 96 government (78 districts government, 18 cities government). Data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression.*

*The results showed that political support, revenue growth and expenditure growth have a effect on budget forecast errors local government in Indonesia. However, position period not have a effect on budget forecast errors local government in Indonesia.*

**Keywords:** *Budget Forecast Errors, Position Period, Political Support, Revenue Growth, Expenditure Growth*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Periode Jabatan, Dukungan Politik, Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja terhadap *Budget Forecast Errors* Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *Budget Forecast Errors* dan variabel independen Periode Jabatan, Dukungan Politik, Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *softcopy* penetapan APBD tahun 2007-2012 yang diperoleh dari Kemendagri RI, data *softcopy* laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK RI serta data eksekutif dan DPRD yang diperoleh dari *website* pemerintah daerah. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan agar diperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 pemerintah daerah (78 pemerintahan kabupaten, 18 pemerintahan kota). Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan periode jabatan tidak berpengaruh terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah Indonesia.

**Kata kunci:** *Budget Forecast Errors, Periode Jabatan, Dukungan Politik, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Belanja*

## **1. PENDAHULUAN**

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting yang ada di dalam hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik yaitu masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (Winarna dan Murni, 2007). Masalah keuangan daerah dan anggaran daerah yang dimaksud yaitu menyangkut kewenangan daerah otonom untuk mengatur sendiri pendapatan dan belanja daerahnya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan APBD sebelumnya (Carolina dan Sutaryo, 2014). Dikarenakan APBD merupakan hal yang penting dan wajib maka harus disusun dengan tepat dan akurat. Namun, tingkat ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan penyusunan anggaran ini disebabkan karena tidak mudahnya melakukan penyusunan anggaran yang mengakibatkan banyaknya keterlambatan penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan tersebut menandakan ketidakmampuan sebuah daerah untuk memproyeksikan atau meramalkan secara cepat dan tepat tingkat pendapatan dan pengeluaran. Ketepatan peramalan anggaran merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keuangan daerah (Wagner dan Garret, 2004). Keadaan keuangan daerah yang tinggi cenderung akan menimbulkan kesalahan pada proyeksi keuangan daerah tahun berikutnya (Blanchard dan Leigh, 2013).

Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proyeksi keuangan daerah khususnya dalam hal belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikarenakan PAD berpengaruh terhadap belanja modal dalam APBD, maka faktor keuangan lain yang berhubungan dengan anggaran bisa juga berpengaruh dan kemungkinan untuk terjadi *budget forecast errors* juga besar. Blanchard dan Leigh (2013) beranggapan bahwa realisasi anggaran khususnya belanja daerah pasti lebih besar dibandingkan dengan peramalan sebelumnya yang menandakan bahwa terjadi kesalahan proyeksi anggaran. Brogan (2012) beranggapan bahwa tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran bukan hanya dipengaruhi dari faktor keuangan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kesalahan proyeksi anggaran bisa juga terjadi dari faktor politik. Salah satu faktor politik yang terjadi yaitu kepala daerah yang sudah pernah memimpin dan mencalonkan kembali rentan terhadap terjadinya kesalahan tingkat proyeksi anggaran yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran selama masa pemilu. Dalam hal ini kepala daerah harus mengelola keuangan publik dengan baik sementara pada saat yang sama kepala daerah juga harus memberikan *reward* kepada para pemilih untuk menjaga kekuasaanya.

Penelitian yang membahas tentang *budget forecast errors* atau tingkat kesalahan proyeksi anggaran di Indonesia relatif jarang dilakukan. Hal ini didasarkan pada review artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi VI tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 yang berjumlah 1190. Dari keseluruhan artikel tersebut terdapat 122 artikel yang membahas tentang akuntansi sektor publik, dan tentang APBD berjumlah 30 artikel. Dari 30 artikel terkait APBD adalah kepala daerah dengan status *incumbent* memanfaatkan APBD untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah dan mempengaruhi proposi belanja bantuan sosial dan belanja hibah (Alam dan Ritonga, 2010). pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Kusnandar dan Siswanto, 2012) dan perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat kesalahan anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan tambahan literatur penganggaran sektor pemerintah dan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penganggaran pemerintah daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### a. Tinjauan Pustaka

#### 1) Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dengan satu pihak (*agent*) yang setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Menurut Halim dan Abdullah (2006) terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak dalam hubungan keagenan yaitu pemberi kewenangan atau kekuasaan disebut *principal* dan penerima kewenangan disebut *agen*. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan teori agensi sebagai hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah, yaitu berupa hubungan yang timbul akibat adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai *principal* yang menggunakan pemerintah sebagai *agent* untuk menyediakan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan wajibnya pemerintahan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya melalui pelaporan keuangan yang ditujukan untuk rakyat. Dengan demikian maka rakyat dapat turut mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, timbul permasalahan akibat adanya kesenjangan informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent* yang sering disebut dengan asimetri informasi. Menurut Arifah (2012) asimetri informasi ini dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan dengan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Informasi yang diterima oleh *principal* terkadang kurang lengkap sehingga tidak dapat menunjukkan kinerja *agent* yang sebenarnya dalam mengelola kekayaan *principal*. Kurangnya informasi yang diperoleh prinsipal bisa dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013). Hal ini terkait dengan Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan adanya permasalahan dalam *agency theory*, yaitu *moral hazard* bahwa permasalahan uang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja dan *adverse selection* bahwa suatu keadaan yang menggambarkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

## 2) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )**

Anggaran merupakan sebuah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004). Freeman dan Shoulders (2003) beranggapan bahwa anggaran sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dan merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Pengertian lain dari Bastian (2006) berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Munandar (2000) definisi anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah sebuah proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran di organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung unsur politik yang tinggi. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2009) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Sebaliknya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 3) ***Forecast Errors***

Peralaman (*forecasting*) adalah seni dan ilmu untuk memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis (Render dan Heizer, 2001). Peramalan dibuat untuk meminimalisir pengaruh ketidakpastian terhadap sebuah permasalahan. Sehingga dalam melakukan peramalan diupayakan untuk tidak terjadi kesalahan meramal (*forecast errors*). Menurut Taylor (2004) dalam hubungannya dengan horizon waktu peramalan terbagi atas beberapa kategori yaitu peramalan jangka pendek (*short-range forecast*), peramalan jangka menengah (*medium-range forecast*), peramalan jangka panjang (*long-range forecast*). Peramalan jangka pendek (*short-range forecast*) mencakup masa depan yang dekat (*immediate future*) dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis, seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Peramalan jangka menengah (*medium-range forecast*) mencakup jangka waktu satu atau dua bulan sampai satu tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya. Peramalan jangka panjang (*long-range forecast*) mencakup periode yang lebih lama dari satu atau dua tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang.

Dalam melakukan peramalan (*forecasting*) sebuah negara belum tentu mampu untuk memproyeksikan atau meramalkan tingkat pendapatan dan pengeluaran secara tepat dan akurat, hal ini dapat mempengaruhi keuangan negara (Wagner dan Garret, 2004). Memproyeksikan atau meramalkan anggaran digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menentukan jumlah anggaran (Brogan, 2012). Penganggaran publik menetapkan prioritas pemerintah bukan hanya untuk menentukan berapa besar dana yang tersedia untuk dihabiskan, namun juga harus menentukan kebijakan dan program yang akan diimplementasikan (Clynch dan Lauth, 1991). Dari perspektif ini, perkiraan pendapatan mengarahkan seluruh kebijakan dan program pemerintahan (Cornia, Nelson dan

Wilko, 2004). Dalam jangka pendek, perkiraan anggaran pendapatan dan belanja tahunan cenderung berisi oleh faktor-faktor politik, sementara perkiraan jangka panjang bias dengan perhitungan politik (Brogan, 2012). Oleh karena itu dalam jangka pendek proses pengembangan perkiraan pendapatan dan belanja anggaran berfungsi sebagai alat politik oleh calon *incumbent* yang berusaha untuk mengumpulkan pemilih dengan kinerja yang dilakukannya terutama pada masa pemilu (Bruck dan Stephan, 2006). Untuk perkiraan jangka panjang bisa dipengaruhi dari faktor keuangan yaitu realisasi pendapatan dan belanja. Blanchard dan Leigh (2013) membuktikan bahwa pendapatan dan biaya bisa mempengaruhi kesalahan proyeksi dalam hal perbedaan realisasi dengan anggaran.

#### 4) **Karakteristik Kepala Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), karakteristik merupakan ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu lain. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 24 ayat 1 dan 2 berisi (1) setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i), kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dibutuhkan kompetensi dari kepala daerah yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut. Penelitian dari Murni dan Winarna (2007) menggunakan proksi karakteristik kepala daerah dengan cara membagi antara *personal background* dan *political background*. *Personal background* meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan, sedangkan *political background* meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. Menurut Hambrick dan Mason (1984) *upper echelon characteristics* dapat menjelaskan

kompetensi dari seorang eksekutif yaitu *age, functional tracks, other career experiences, education, socio economic roots, financial position* dan *group characteristics*.

## 5) **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang menandai sebuah daerah tersebut dan dapat membedakannya dengan daerah yang lain. Karakteristik daerah diharapkan dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor kepatuhan pengungkapan wajib (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Fitriasari dan Mustikarini (2012) dalam penelitiannya menggunakan proksi karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan besarnya belanja pemerintah daerah. Patrick (2007) menggunakan budaya organisasi, struktur organisasi dan lingkungan eksternal sebagai proksi dari variabel karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania. Hartanto dan Probohudono (2013) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah, populasi penduduk, belanja pegawai, pajak daerah dan HDI setiap daerah. Sutaryo dan Winarna (2013) menggunakan karakteristik pemerintah daerah di Indonesia yaitu pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan status daerah dalam penelitiannya sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

### **b. Hipotesis**

#### 1. Periode Jabatan Kepala Daerah dan *Budget Forecast Errors*

Untuk menentukan kepala daerah dari setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu). Menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa kepala daerah yang memenangkan suara pemilu



memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama disebut dengan calon *incumbent*. Dikarenakan kepala daerah tersebut memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali maka pada periode pertama kepala daerah tersebut cenderung membuat citra yang baik agar pada periode kedua nanti dapat dipilih kembali. Menurut Alam dan Ritonga (2010) dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan politisasi anggaran. Abdullah dan Asmara (2006) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Periode jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.**

## 2. Dukungan Politik dan *Budget Forecast Errors*

Menurut Adzani dan Martani (2014) proses politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurut Gourevitch (2003) proses politik itu juga dapat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan melalui berbagai macam cara baik melalui group kepentingan (partai politik), hubungan antar masyarakat (*cross coalition*) dan hubungan eksekutif-legislatif sehingga dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Proses politik di Indonesia dicerminkan pada proses pemilihan umum. Pemilukada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh koalisi partai politik, fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih terlihat terhadap pengaruh figur kandidat (Adzani dan Martani, 2014). Semakin banyak kepala daerah tersebut memiliki dukungan partai terutama yang

memiliki kedudukan di DPRD maka akan semakin besar kemungkinan terjadi *budget forecast errors* dikarenakan usulan apapun mengenai anggaran dari kepala daerah akan selalu disetujui karena di dalamnya terdapat mekanisme politik yang lebih memikirkan kepentingan kelompok partai. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.**

3. Pertumbuhan Pendapatan dan *Budget Forecast Errors*

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Salah satu komponen dari total pendapatan dalam APBD yaitu pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi setiap daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tersebut mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. PAD juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kemandirian setiap daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Sehingga semakin besar penerimaan PAD maka daerah tersebut semakin mandiri dan bebas mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk anggaran tahun berikutnya. Daerah yang semakin bebas mengalokasikan PAD yang diterima maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi *budget forecast errors*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.**

4. Pertumbuhan Belanja dan *Budget Forecast Errors*

Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah, 2009). Menurut Permendagri no 37

tahun 2014 tahapan awal penyusunan APBD yaitu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang disusun memuat rencana kerja dan pendanaan yang akan digunakan, sehingga anggaran belanja akan disusun sebelum menentukan pendapatan yang akan diterima. Rencana kerja yang semakin banyak akan menyebabkan realisasi belanja yang semakin besar, maka kemungkinan untuk mengalokasikan anggaran belanja untuk tahun berikutnya juga semakin meningkat. Blanchard dan Leigh (2013) beranggapan bahwa realisasi anggaran pasti lebih besar dibandingkan dengan peamalan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H4 = Pertumbuhan belanja berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.**

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **a. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2010. *Sample frame* dari penelitian ini yaitu daftar pemerintah daerah tahun 2010. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan tujuan agar diperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yaitu pemerintah kabupaten/kota tahun 2010, pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2010, pemerintah kabupaten/kota yang menyusun LKPD dan diaudit oleh BPK tahun anggaran 2007-2012. Pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai *website* dan dapat diakses yang menyediakan data jumlah SKPD, tingkat pengangguran terbuka dan PDRB per kapita. Terdapat sebanyak 493 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2010. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 pemerintah daerah.

**INSERT TABEL 1**

**b. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari berbagai macam sumber, sebagai berikut:

**INSERT TABEL 2**

**c. Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel dependen yang digunakan adalah *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu periode jabatan kepala daerah (incumbet/non incumbent), dukungan politik (jumlah dukungan partai politik), pertumbuhan pendapatan (laju pertumbuhan pendapatan) dan pertumbuhan belanja (laju pertumbuhan belanja). Lebih lanjut, variabel dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

**INSERT TABEL 3**

**d. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda sebagai berikut :

**Persamaan I.**

$$(\text{STATE LEVEL REVENUE [EXPENDITURE]})_K = \beta_0 + \beta_1 \text{UNEMPLOYMENT}_{1,t} + \beta_2 \text{LAGGED GSP}_{K-1} + \beta_3 \text{LAGGED REVENUES}_{K-1} + \epsilon_t$$

Keterangan:

- Revenue = Anggaran pendapatan t
- Expenditure = Anggaran belanja t
- Unemployment = Tingkat pengangguran terbuka tahun pemilukada
- GSP = PDRB perkapita tahun sebelum pemilukada
- Revenues = Anggaran pendapatan t-1
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- $\epsilon_t$  = *Standard Errors*

**Persamaan II.**

$$\beta(BFE) = \beta_0 + \beta_1 (\text{PERIODE}) + \beta_2 (\text{PARPOL}) + \beta_3 (\text{GROWREV}) + \beta_4 (\text{GROWEXP}) + \beta_5 (\text{KOMPLEK}) + \beta_6 (\text{TIPE}) + \epsilon_t$$

Keterangan:

<i>BFE</i>	= Kesalahan proyeksi anggaran
PERIODE	= Periode jabatan kepala daerah
PARPOL	= Jumlah dukungan partai politik
GROWREV	= Pertumbuhan pendapatan
GROWEXP	= Pertumbuhan belanja
KOMPLEK	= Jumlah SKPD per kabupaten/kota
TIPE	= Tipe pemerintahan daerah
$\beta$	= Koefisien Regresi
$\epsilon_t$	= <i>Standard Errors</i>

### INSERT GAMBAR 1

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### a. Statistik Deskriptif

#### INSER TABEL 4

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 96. Dari 96 sampel tersebut variabel independennya yaitu PERIODE, PARPOL, GROWREV dan GROWEXP dengan variabel kontrol KOMPLEK dan TIPE serta variabel dependen FORECAST. Hasil statistik deskriptif pada TABEL 4 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 96 sampel. Rata-rata pemerintah daerah memiliki tingkat kesalahan proyeksi anggaran sebesar 29,62166 dengan perolehan tingkat *budget forecast errors* tertinggi pemerintahan Kabupaten Malang, sedangkan tingkat *budget forecast errors* terendah diperoleh Kabupaten Solok Selatan. Dari total pemerintahan yang menjadi sampel terdapat 50% pemerintahan daerah dengan kepala daerah berstatus *incumbent* dan sisanya berstatus *non incumbent*. Rata-rata dukungan partai politik yang diperoleh kepala daerah sebesar 29,77% yang diperoleh dari jumlah kursi legislatif dibagi dengan jumlah kursi yang dimenangkan partai politik pendukung kepala daerah. Rata-rata untuk laju pertumbuhan pendapatan sebesar 10,56% yang diperoleh dari total pendapatan tahun ini dikurangi total pendapatan tahun lalu dibagi total pendapatan tahun lalu. Rata-rata untuk laju pertumbuhan belanja sebesar 5,60% yang diperoleh dari total belanja tahun ini dikurangi total belanja tahun lalu dibagi total belanja tahun lalu.

Untuk variabel kontrol jika dilihat dari rata-rata jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dari setiap pemerintah daerah memiliki jumlah sebesar 45,51 ( $\approx$  46 SKPD). Dari total pemerintah daerah yang menjadi sampel 19% adalah pemerintah kota dan sisanya adalah pemerintah kabupaten.

**b. Uji Normalitas Data**

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai *asympt sig* sebesar 0,089 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5% atau 0,05. Oleh karena data telah terdistribusi secara normal, maka data dapat digunakan untuk pengujian dengan model regresi berganda.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil nilai probabilitas (*sig*) dalam setiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

**d. Uji Multikolinieritas**

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan hasil nilai *tolerance* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai *value inflating factor* (VIF) untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Sehingga model-model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel dalam model-model penelitian terjadi homokedastisitas.

**e. Uji Hipotesis dan Pembahasan**

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda.

**INSERT TABEL 5**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Artinya periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil ini berbeda dengan hipotesis bahwa kepala daerah dengan periode jabatan *incumbent* akan lebih berpengaruh terhadap tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah dibandingkan dengan kepala daerah non *incumbent*. Hal ini bisa disebabkan baik calon *incumbent* maupun non *incumbent* tidak mempengaruhi kesalahan

penganggaran dikarenakan motivasi jabatan yang sama sesuai dengan teori agensi yaitu jika informasi yang diperoleh *principal* dari *agent* tidak lengkap dan tidak menunjukkan kinerja agent yang sebenarnya dalam mengelola kekayaan *principal*, maka dapat dimanfaatkan agen untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013). Dengan demikian baik di periode pertama maupun kedua sama-sama berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga tidak mempengaruhi kesalahan yang dibuat baik calon *incumbent* maupun *non incumbent*.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah baik pada periode pertama ataupun periode kedua yang mengindikasikan bahwa motivasi kepala daerah tersebut sama. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa jumlah dukungan partai politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil ini sama dengan hipotesis bahwa semakin tinggi jumlah dukungan partai politik yang memenangkan kursi legislatif maka akan semakin tinggi tingkat kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan usulan apapun mengenai anggaran dari kepala daerah akan selalu disetujui karena di dalamnya terdapat mekanisme politik yang lebih memikirkan kepentingan kelompok partai. Sehingga, dukungan partai politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Brogan (2012) yang menyebutkan bahwa faktor politik, waktu siklus pemilu dan lembaga politik mempengaruhi perkiraan anggaran dimana *budget forecast errors* penelitian ini diketahui melalui tingkat kesalahan proyeksi anggaran.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa pertumbuhan pendapatan yang berasal dari perhitungan total pendapatan tahun ini dikurangi dengan total pendapatan tahun lalu dibagi dengan total pendapatan tahun lalu berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan yang diprosikan dari total PAD, maka akan semakin tinggi tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2012) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal yang merupakan salah satu bagian dari APBD.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa pertumbuhan belanja yang berasal dari perhitungan total belanja tahun ini dikurangi dengan total belanja tahun lalu dibagi dengan total belanja tahun lalu berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja maka akan semakin tinggi tingkat *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Realisasi belanja daerah sebelum tahun anggaran akan mendasari penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka semakin besar belanja daerah akan semakin meningkat pula *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Blanchard dan Leigh (2013) bahwa belanja berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran jika dikaitkan dengan PDRB yang menjadi salah satu komponen perhitungan *budget forecast errors*. Variabel kompleksitas dan tipe pemerintahan sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa kompleksitas yang digambarkan dengan jumlah SKPD dan tipe pemerintahan yang digambarkan dengan tipe pemerintahan kota dan kabupaten tidak berpengaruh terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian atas pengaruh periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan bahwa dukungan politik, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan periode jabatan tidak berpengaruh terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Indonesia.



**b. Keterbatasan, Saran dan Implikasi**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang sebagian besar berasal dari *website* pemerintah daerah, namun banyak *website* pemerintah daerah yang tidak aktif dan tidak dapat diakses serta tidak menampilkan informasi lengkap mengenai kepala daerah. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan umum tahun 2010.

**c. Saran dan Implikasi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan baik bagi pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah daerah dukungan partai politik seharusnya dapat dijadikan media untuk meminimalisasi *budget forecast errors* dengan cara melakukan proses pengawasan secara lebih intensif terkait dengan proses penganggaran agar dapat menjaga komitmen dari kepala daerah dan tetap menjaga kedudukan kepala daerah. Selain itu anggota legislatif juga perlu meningkatkan pemahaman terkait dengan APBD sehingga dengan pemahan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan PAD dengan memperbaiki proses penganggaran, misalnya dengan melakukan analisis potensi PAD yang dilakukan secara baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan walaupun PAD tinggi. Selain PAD, dalam penganggaran belanja pemerintah daerah juga harus melakukan analisis apakah belanja yang dikeluarkan dapat bermanfaat untuk masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bagi peneltian selanjutnya dalam pencarian data tidak hanya mendasarkan pada *website* pemerintah daerah, tetapi mencari sumber data lain, dalam menentukan sampel tidak hanya pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum tahun 2010 dan memperpanjang periode dalam mengukur *budget forecast errors* sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

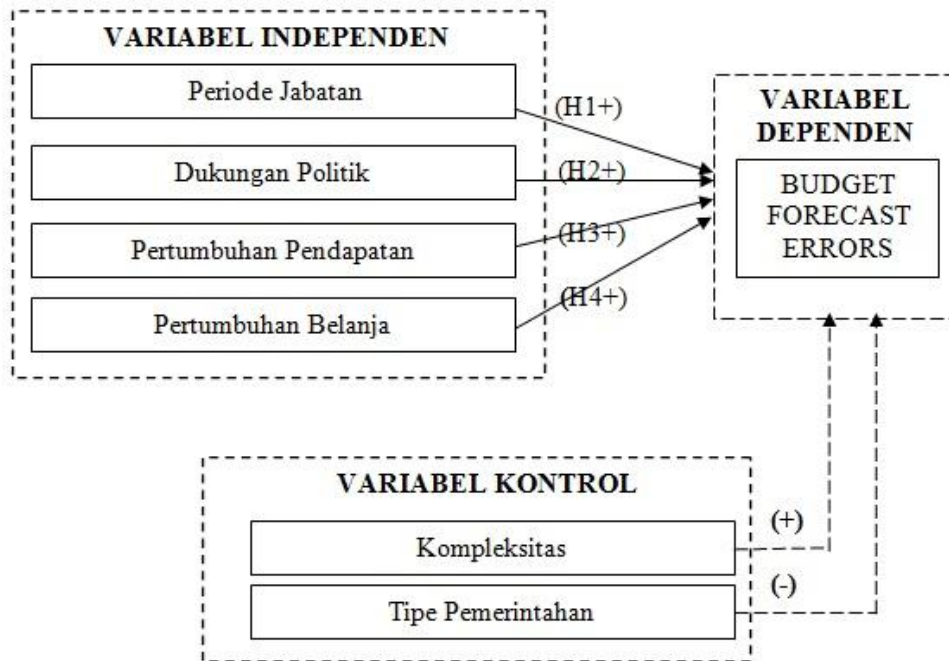
## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Asmara, Jhon A. 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Adzani, Akhmad H. dan Martani, Dwi. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.
- Arifah, Dista A. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Jurnal Prestasi Vol.9, No.1,pp:85-95.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlanga, Jakarta.
- Blanchard O dan Leigh D. 2013. *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers*. International Monetary Fund. IMF Working Paper.
- Brogan, Michael. 2012. *The Political of Budgeting: Evaluating the Effect of the Political Election Cycle on State-Level Budget Forecast Errors*. Public Administration Quarterly SPRING. Rider University. 85-93.
- Brück, Tilman dan Stephan, Andreas. 2006. *Do Eurozone Countries Cheat with their Budget Deficit Forecasts?*. Kyklos. Blackwell Publishing. 59(1), 3-15.
- Carolina, Okki dan Sutaryo. 2014. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.
- Clynch, Edward, dan Thomas Lauth. 1991. *Governors, Legislators, and Budgets: Diversity across the American States*. New York: Greenwood Press.
- Cornia, Gary C., Ray N., dan Andrea W. 2004. *Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores*. Public Administration Review. 64 (2), 164-179.
- Darwanto dan Yustikasari Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Data Keuangan Daerah.
- Fitriasari, Debby., dan Mustikarini, Widya A. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupate/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2007. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Freeman, R.J dan Shoulders C.D. 2003. *Governmental and Non Profit Accounting; Theory and Practices*. New Jersey. Pearsons Education Inc.
- Garret, T.A dan Wagner G.A. 2004. State Government Finances: World War II to the Current Crises. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, March/April 2004, 86(2),pp.9-25.
- Ghozali. I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Gourevitch., P., A., (2003) The politics of corporate governance regulation. *New York: Oxford University Press*, pp. 250.
- Hambrick, Donald C., dan Mason, Phyllis A. 1984. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, Vol.9, Issue 2 (April), pp:193-206.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah:Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1):53-64.
- Hartanto, Rudy., dan Probohudono, Agung N. 2013. Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Hayo, Bernd dan Florian Neumeier. 2013. *Political Leaders' Socioeconomic Background and Public Budget Deficits: Evidence from OECD Countries*. Philipps-University Marburg.
- Heizer, J dan Render, B. 2001. Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusnandar dan Siswantoro D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2000. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPF.
- Nafarin, M. 2004. Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat: Jakarta.
- Nordiawan, D., Iswahyudi S.P., dan Maulidah R. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Mansur Iskandar Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.
- Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas, Rena R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemeerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No.1, pp:1-94.
- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Taylor, Bernand W. 2004. Management Science. Jakarta : Salemba Empat.
- Winarna, J dan Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- <http://www.bps.go.id/> (diakses 15 Desember 2014)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia) (diakses 12 Desember 2014).

LAMPIRAN

**GAMBAR 1**  
Diagram Skematik Kerangka Teoritis



**TABEL 1**  
Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah daerah tahun 2010 di Indonesia (Badan Pusat Statistik)	493
2	Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pemilukada tahun 2010	(284)
3	Pemerintah daerah yang mempunyai <i>website</i> tetapi tidak aktif dan tidak dapat diakses	(47)
4	Pemerintah daerah yang tidak menyajikan data untuk pengukuran variabel	(66)
	Jumlah sampel	96

**TABEL 2**  
Sumber Data Penelitian

No	Data	Sumber Data
1.	Profil Kepala Daerah	<i>Website</i> pemerintah daerah. Kemendagri. dan buku profil kepala daerah.
2.	Profil Pemerintah Daerah	<i>Website</i> pemerintah daerah.
3.	Data APBD	LKPD dan <i>website</i> Kemenkeu
4.	PAD dan Belanja Daerah	LKPD
5.	Data jumlah pengangguran	<i>Website</i> Badan Pusat Statistik
6.	Data PDRB	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan <i>website</i> Badan Pusat Statistik

**TABEL 3**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Nama	Akronim	Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b>		
Tingkat kesalahan proyeksi anggaran	BFE	Nilai rata-rata <i>standard errors</i> dari hasil regresi dengan data anggaran pendapatan / belanja, jumlah pengangguran terbuka dan PDRB perkapita.
<b>Variabel Independen</b>		
Periode jabatan kepala daerah	PERIODE	Variabel <i>dummy</i> dengan angka 1 untuk periode jabatan <i>incumbent</i> dan angka 0 untuk periode jabatan <i>non incumbent</i> .
Dukungan politik	PARPOL	Jumlah kursi yang dimenangkan partai pendukung dibagi dengan jumlah kursi legislatif per kabupaten/kota.
Pertumbuhan Pendapatan	GROWREV	Laju pertumbuhan PAD antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan Belanja	GROWEXP	Laju pertumbuhan belanja antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya.
<b>Variabel Kontrol</b>		
Kompleksitas Tipe Pemerintahan	KOMPLEK TIPE	Jumlah SKPD per kabupaten/kota. Variabel <i>dummy</i> dengan angka 0 untuk tipe pemerintah kabupaten dan angka 1 untuk tipe pemerintah kota.

**TABEL 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
BFE	96	4,17	143,77	43,5177	29,62166
PERIODE	96	0	1	0,50	0,503
PARPOL	96	0,04	0,70	0,2977	0,13301
GROWREV	96	-0,46	0,60	0,1056	0,22436
GROWEXP	96	-0,47	0,82	0,560	0,15615
KOMPLEK	96	11	0,80	45,51	14,162
TIPE	96	0	1	0,19	0,392
Valid N (listwise)	96				

*Keterangan: BFE=Budget Forecast Errors, PERIODE= periode jabatan kepala daerah, PARPOL=Dukungan partai politik, GROWREV=Pertumbuhan pendapatan, GROWEXP=Pertumbuhan belanja, KOMPLEK=Kompleksitas dari jumlah SKPD, TIPE=Tipe pemerintah kabupaten/kota*

**TABEL 5**  
**Uji Signifikansi-t**

<i>Model</i>	<i>Exp. Sign</i>	<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
		<i>Beta</i>	<i>T</i>	
1. (Constant)			0,635	0,527
PERIODE	+	0,049	0,496	0,621
PARPOL	+	0,247	2,514	0,014 <sup>a</sup>
GROWREV	+	0,167	1,702	0,092 <sup>b</sup>
GROWEXP	+	0,206	2,101	0,038 <sup>a</sup>
KOMPLEK	+	0,132	1,318	0,191
TIPE	-	0,083	0,833	0,407

a. Dependent Variabel: FORECAST

*Keterangan: PERIODE= periode jabatan kepala daerah, PARPOL=Dukungan partai politik, GROWREV=Pertumbuhan pendapatan, GROWEXP=Pertumbuhan belanja, KOMPLEK=Kompleksitas dari jumlah SKPD, TIPE=Tipe pemerintah kabupaten/kota*

<sup>a</sup>Signifikan pada sig < 5%

<sup>b</sup>Signifikan pada sig < 10%